



DISKOMINFO
Statistik & Persandian
Kabupaten Blitar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Blitar merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Diskominfo Kabupaten Blitar dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Blitar, 28 Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan
Persandian
Kabupaten Blitar



HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 196509161991121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar yang didalamnya terdiri atas sekretariat dan 4 bidang, merupakan unsur dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang bertugas membantu Kepala Daerah Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mengemban satu misi Pemerintah Kota Blitar, yaitu misi ke-3 (tiga) **Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas.**

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut ditetapkan 1 (satu) Tujuan yaitu **Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi.** Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola dan Layanan SPBE
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis yang menjadi kinerja utama dengan dukungan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran 2024 oleh masing-masing bidang dari dana APBD Kabupaten Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.

Didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2024 jumlah anggaran belanja adalah sebesar Rp. 16.558.559.628,-

Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya mewujudkan Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar yang dituangkan dalam 5 (lima) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Secara keseluruhan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Kabupaten Blitar selama tahun anggaran 2024 menunjukkan kinerja yang **Berhasil** dengan ditandai oleh rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Kabupaten Blitar tahun 2024 dengan nilai 100,1%

Blitar, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik
dan Persandian
Kabupaten Blitar



HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 196509161991121001

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I	6
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	6
B. Aspek Strategis Organisasi.....	8
C. Dasar Hukum.....	11
D. Sistematika dokumen.....	12
BAB II.....	14
A. Visi dan Misi.....	14
B. Tujuan dan Sasaran.....	14
A. <i>Indikator Kinerja Utama</i>	14
B. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2024</i>	16
C. <i>Perencanaan Anggaran Tahun 2024</i>	18
BAB III.....	21
A. Pengukuran Kinerja.....	21
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
1. <i>Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>	22
2. <i>Sasaran Meningkatnya Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE</i>	31
3. Realisasi Anggaran	43
4. Prestasi/ Penghargaan.....	51
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	67
PENGUKURAN KINERJA	70

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Isu – Isu strategis
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.1 Kriteria Capaian Indikator Kinerja
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja
Tabel 3.3 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2023
Tabel 3.4 Data Jumlah Sistem Informasi Sampai Dengan Tahun 2023
Tabel 3.5 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 Tahun 2023
Tabel 3.6 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2023
Tabel 3.7 Daftar Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Blitar Pada Tahun 2023
Tabel 3.7 Daftar Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Evaluasi Pembangunan Daerah Di Kota Blitar Pada Tahun 2023
Tabel 3.9 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 4 Tahun 2023
Tabel 3.10 Tabel Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023
Tabel 3.11 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)
Tabel 3.14 Tabel Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung
Tabel 3.15 Alokasi Pertujuan dan/atau Sasaran Pembangunan
Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

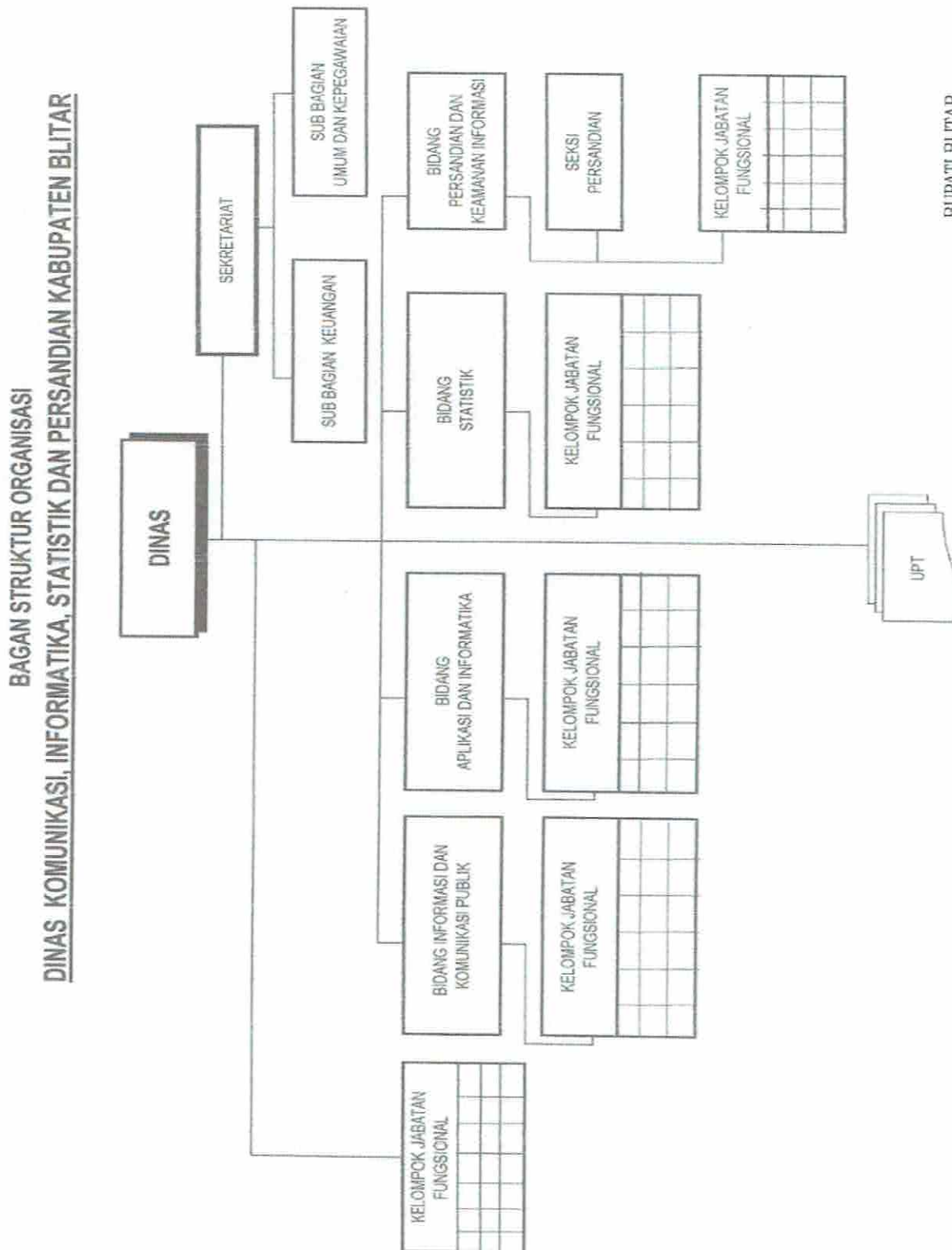
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Penyusunan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian ;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian ;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas ;
5. Pembinaan UPT;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitardipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dan Bidang Teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :



Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar memiliki ASN sebanyak 27 orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar pada tahun 2024.

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

NO	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Administrator	5 orang
3	Pengawas	3 Orang
4	Pelaksana	9 orang
4	Jabatan Fungsional Ahli Muda	5 orang
5	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	3 orang
	Jumlah	26 orang

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah.

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Pemasalahan
1	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi yang belum maksimal Kurangnya kualitas konten informasi publik yang memadai Belum terpenuhinya	Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal hoax Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat

		aplikasi yang memenuhi standart teknis pembangunan aplikasi Belum maksimalnya perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TIK	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam [enyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE Belum optimalnya pemerataan fasilitasi akses informasi publik dan internet sehat Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju e-commerce Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya smart city Masih terbatasnya sumberdaya yang memadai di bidang layanan informatika
2	Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas dan tepat waktu	Belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi guna pengambilan kebijakan pembangunan daerah	Belum adanya sistem integrasi data data statistik sektoral Belum optimalnya ketersediaan data data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah Belum memadainya kapasitas SDM pendataan dan statistik daerah
3	Kualitas layanan persandian	Belum optimalnya pemanfaatan persandian sebagai pengamanan informasi dan sistem informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan kewan informasi di lingkungan pemerintah daerah Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang diamankan

		pemerintah daerah	Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian dan informasi daerah Kurangnya SDM di bidang pengelolaan persandian daerah
--	--	-------------------	---

Dari pemetaan permasalahan permasalahan tersebut diatas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar telah merumuskan isu isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyediaan insfrastruktur teknologi informasi dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi. Isu ini ditempuh melalui peningkatan kualitas SDM ASN dalam bidang TIK, literasi digital yang masif kepada msayarakat salah satunya melalui pemberdayaan realawan TIK dan mendorong penerapan teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE, serta pentingnya konsolidasi distribusi bandwith di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Blitar.
2. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Isu ini ditempuh melalui pemerataan kemampuan SDM dalam mengolah/menyajikan informasi positif/penangkal hoax, meningkatkan literasi digital kepada msayarakat, dan penerapan managemen komunikasi pemerintah di era digital.
3. Peningkatan pengelolaan Satu Data Kabupaten Blitar dan optimalisasi sistem integrasi data statistik sektoral daerah. Dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan daerah; ini ditempuh melalui terbangunnya data center yang baik dan terintegrasi , pembinaan dan penguatan regulasi terkait pemanfaatan data yang dihasilkan oleh seluruh OPD;
4. Meningkatkan kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan kemanan informasi. Isu ini ditempuh melalui pemerataan pengetahuan dan literasi terkait kemanan informasi pada sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang sudah menerapkan

pedoman Indeks keamanan informasi dan standart SNI ISO / IEC 27001.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024;
- p. Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar
- q. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

D. Sistematika dokumen

Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi Misi
- B. Tujuan dan Sasaran

C. Indikator Kinerja Utama

D. Perjanjian Kinerja

E. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Kinerja organisasi

1. Menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator kinerja
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
5. Membandingkan realisasi kinerja dengan standart nasional
6. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
8. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
9. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Pemecahan Masalah
3. Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki Visi : Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berdasarkan Ahklak Mulia (Baldatun Thoyibatun Wa robbun Ghofur). Visi tersebut tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2016 . Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah : Misi ke -3 RPJMD : Menujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas.

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu startegis serta memperhatikan misi Kabupaten Blitar maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Dinas Komun ikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu :

Tujuan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi.

Sasaran : Meningkatnya Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama

no	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Difinisi Operasional Indikator	Sumber data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat	Hasil Evaluasi Inspektorat	Sekretariat
2	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Indeks SPBE Nilai Tata Kelola SPBE Nilai Layanan SPPBE	Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB	Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian

Indikator Kinerja utama Indeks SPBE merupakan IKU dari Pemerintah Kabupaten Blitar, merupakan hasil Evaluasi dari Kemenpan RB atas penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2024 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setian tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan Target kinerja

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP hasil perangkat Daerah	BB
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	3,6
		Nilai Layanan SPBE	4,07

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.905.753.129,00	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.995.243.219,00	APBD/DBHCHT

3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.010.789.762,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	747.854.832,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Kemanan Informasi	320.986.589,00	APBD
	Jumlah	14.980.627.531,00	

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun 2024.dan peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2024 tentang penjabaran Perubahan APBD 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kienrja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP hasil perangkat Daerah	BB
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	2,8
		Nilai Layanan SPBE	3,8

no	Program	Anggaran	Keteran gan
----	---------	----------	----------------

1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.059.318.576,00	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.962.495.972,00	APBD/D BHCHT
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.519.343.659,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	745.75.4832,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	320.986.589,00	APBD
	Jumlah	16.558.599.628,00	

Perubahan target ini juga merupakan hasil kesepakatan perubahan target dalam Renstra.

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 14.980.627.531,00. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan refocusing. Oleh karena itu, alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 16.558.599.628,00 dengan rincian sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2
Rincian Anggaran pada Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.905.753.129	5.055.567.676
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	38.994.225	102.301.225
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.771.126	23.268.126
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.223.099	79.033.099
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.189.649.205	3.318.724.743
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.142.599.080	3.283.294.618

1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.120.000	29.500.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.930.125	5.930.125
1.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	15.000.000	15.000.000
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	15.000.000
1.4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	376.767.558	398.331.475
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.776.660	2.776.660
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.697.373	20.451.328
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.825.000	134.821.000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.723.425	36.477.895
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	1.750.000	1.750.000
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.995.100	202.054.592
1.5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	195.824.182	146.079.774
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.824.182	146.079.774
1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	877.836.458	863.736.458
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.162.500	4.162.500
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.550.000	1.310.000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.123.958	858.263.958
1.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	211.681.501	211.394.001
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.653.000	147.365.500
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.028.501	64.028.501
2	<i>Program Informasi dan Komunikasi Publik</i>	3.995.243.219	4.962.495.972
2.1	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.995.243.219	4.962.495.972
2.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	738.723.449	738.723.449
2.1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.951.739.690	3.302.380.443
2.1.3	Pelayanan Informasi Publik	304.780.080	921.392.080
3	<i>Program Aplikasi Informatika</i>	5.010.789.762	5.519.343.659
3.1	<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub</i>	4.319.119.509	4.366.619.406

	<i>Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.319.119.509	4.366.619.406
3.2	<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	691.670.253	1.152.724.253
3.2.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	104.587.261	195.888.361
3.2.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	296.986.800	364.190.800
3.2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	121.660.660	381.051.099
3.2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	47.662.460	95.351.902
3.2.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	120.813.072	116.242.091
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	747.854.832	745.754.832
4.1	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	747.854.832	745.754.832
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	555.840.384	561.029.012
4.1.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	192.014.448	184.725.820
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	320.986.589	271.686.589
5.1	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	320.986.589	271.686.589
5.1.2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	320.986.589	271.686.589
		14.980.627.531	16.558.559.628

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam merepakan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2024. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan formula :

Realisasi Capaian

$$\frac{\text{Realisasi Capaian}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Target Kinerja

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	88,9 %	Tinggi
2.	Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan penerapan SPBE	96,7 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Tata Kelola SPBE	107,1 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Layanan SPBE	110,5 %	Sangat Tinggi
		100,8 %	Sangat Tinggi

B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2024

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 88,89 %. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Realisasi kinerja sasaran meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,56	68,95	88,89%
Capaian Kinerja					88,89. %

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Blitar. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator nilai SAKIP dapat direalisasi sebesar 69,95. Target Tahun 2024 adalah 77,56 (Peringkat BB). Dengan pencapaian 88,89 % dari target yang telah ditentukan dengan kategori berkinerja Tinggi. Namun capaian tersebut belum optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan. Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 (isikan 2/3 tahun terakhir). Hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian oleh Inspektorat sebagai berikut :

- Pada Evaluasi Perencanaan kinerja menunjukkan crosscutting yang disusun belum memberikan informasi yang jelas tentang hubungan kinerja dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan. Belum terdapat pemantauan rencana aksi Tahun 2024 yang dilakukan secara berkala dan disertai targetnya. Pemantauan rencana aksi dan telah dilakukan setiap Tribulan.
- Evaluasi Pengukuran Kinerja : Belum menyajikan definisi operasional untuk pengukuran kinerja, belum menyajikan rencana aksi dan data kinerja
- Evaluasi Pelaporan Kinerja : Laporan kinerja yang disusun belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021. Belum menginformasikan keseluruhan

kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja.

- Evaluasi Akuntabilitas

Dari hasil evaluasi tersebut Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian telah menindak lanjuti hasil rekomendasi guna perbaikan SAKIP sesuai dengan Aplikasi E-TL APIP.

Tabel 3.5

Perkembangan kinerja sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB BB	77,56 BB	68,95 B
Dst					

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian Tahun ke 4 dari periode Renstra pada Tahun 2021 - 2026 Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.6

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas terhadap target jangka menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	A	B	

Realisasi kinerja ini tidak bisa kita bandingkan dengan Capaian kinerja Tingkat

Propinsi maupun Nasional karena indikator sasaran yang berbeda.

Tabel 3.7

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/ Nasional Tahun 2024
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP	B	A

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam pengumpulan data kinerja, sehingga pada saat penyusunan laporan kinerja dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk penyusunan laporan kinerja
3. Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk dapatnya mengisi Jabatan Perencana maupun pelaksana / Staf perencana.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Struktur organisasi yang semula Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan tipe B (3 Bidang dan Sekretariat) berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe B (4 Bidang dan Sekretariat). Perubahan struktur organisasi tersebut juga merubah struktur dan pejabat khususnya di sekretariat. Dengan tipe A peta jabatan yang ada di Sekretariat ada pejabat Struktural Sekretaris, Kasubag Umum Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Jabatan Fungsional Perencana. Kondisi yang ada di

Sekretariat ada 5 ASN terdiri dari : Sekretaris, Kasubag Umum Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Staf Pelaksana (Bendahara Pengeluaran) dan Staf pelaksana (pengurus barang). Untuk Jabatan Fungsional Perencana belum ada yang ditugaskan secara definitif. Sehingga tugas tugas perencana **sebagian** dilaksanakan Kasubag Keuangan dan Sekretaris serta dibantu oleh tenaga non ASN (membantu juga sebagai admin SIPD).

2. Kekurangan SDM khususnya Jabatan Fungsional Perencana maupun pelaksana yang melaksanakan tugas perencana dan pelaporan sangatlah menghambat dalam penyusunan LKJIP, karena dilaksanakan Kasubag Keuangan yang pada saat bersamaan melaksanakan penyusunan laporan keuangan maupun tugas perencanaan dan pelaporan yang lain.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebesar Rp. 5.059.318.576 dengan realisasi sebesar Rp. 4.791.362.991,-- Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah

Tabel 3.8

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja perangkatan daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya Kinerja perangkat Daerah	88,89. %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Rp5.059.318.576	Rp4.791.362.991	94.7 %
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Rp102.301.225	Rp102.203.700	99,90%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.23.268.126	Rp.23.170.900	99,58%
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp79.033.099	Rp79.032.800	99,99%
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.322.475.643	Rp3.209.031.255	96,59%
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.287.045.518	Rp3.173.907.355	96,56%
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp29.500.000	Rp29.490.000	99,97%
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp5.930.125	Rp5.633.900	95%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp15.000.000	Rp13.085.000	87,23%
			Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp15.000.000	Rp13.085.000	87,23%
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp398.331.475	Rp395.257.003	99,23
			Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.776.660	Rp2.697.000	96,91%
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp20.451.328	Rp19.470.300	95,20%
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp134.821.000	Rp134.041.000	99,42%
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak	Rp36.477.895	Rp35.562.500	97,49%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			dan Penggandaan			
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp1.750.00 0	Rp1.562.00 0	89,26%
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp200.054. 592	Rp201.930. 203	99,94%
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp146.079. 774	Rp133.752. 000	91,56%
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp146.079. 774	Rp133.752. 000	91,56%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp863.736. 458	Rp742.298. 140	85,94%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pemerintahan Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp4.162.500	Rp4.160.000	99,94%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.310.000	Rp309.392	23,62%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp856.263.958	Rp737.828.748	85,97%
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp211.394.001	Rp195.735.893	92,59
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp147.365.500	Rp133.124.190	90,34%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp64.028.501	Rp62.611.703	97,79%
			Tingkat efisiensi			93,9 %

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 88,89 % sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 94,79 %. Oleh karena itu kurang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan nilai kurang efisien sebesar 6,1 %.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Menetapkan rencana aksi dari dan pemantauan kinerja secara berkala.
2. Mengadakan pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang
3. Pengumpulan data kinerja untuk disajikan dalam laporan kinerja, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

2. Sasaran Meningkatnya Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE

Sasaran ini tidak terlepas Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja dan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, KemenpanRB bersama Tim Koordinasi SPBE nasional melakukan evaluasi SPBE. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2024 Indeks SPBE Kabupaten Blitar : 3,77 (sangat Baik) meningkat dibanding Indeks SPBE Tahun 2023 sebesar 3,63 (Sangat Baik). Nilai ini masih dibawah Indeks SPBE Propinsi Jawa Timur : 4,45 dan diatas Indeks SPBE Nasional Tahun 2024 : 3,12.

Dalam sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 108,8 %. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE

Tabel 3.2

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam layanan Publik yang terintegrasi	Indeks SPBE	3,8	3,77	99,2%
2	Meningkatnya tata	1 Nilai Tata Kelola	2,8	3.00	107,1.

	kelola dan layanan SPBE	SPBE			%
		2 Layanan SPBE	3,8	4,2	110,5 %
Capaian Kinerja					105,6 %

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 2 indikator. Indikator pertama Nilai Tata Kelola SPBE adalah hasil penilaian aspek perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penyelenggaraan SPBE. Target Tahun 2024 Nilai Tata Kelola dengan nilai 2,8 dengan relaisasi 3,00 atau 107,1 % berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE Menteri PANRB Tahun 2024.

Indikator kedua Nilai Layanan SPBE : penilaiaian aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan publik berbasis elektronik Target layanan SPBE Tahun 2024 sebesar 3,8 dengan realisasi : 4,2 berdasarhan hasil evaluasi SPBE dari MenPANRB Tahun 2024. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator kedua Nilai layanan SPBE . dapat direalisasi sebesar 110,5 %

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE. mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan sudah terpenuhinya indikator untuk penerapan SPBE meliputi Arsitektur SPBE, Managemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Managemen Kemananan Informasi, Audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE. Meskipun nilainya belum optimal. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2024.

Tabel 3.9

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Meningkatnya efisiensi dan	Indeks SPBE	2,61	3,63	3,77

	efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam layanan Publik yang terintegrasi				
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	2,3	3,6	3,00
		Nilai Layanan SPBE	3,51	4,07	4,2

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian Tahun ke 4 dari periode Renstra pada Tahun 2021 – 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.10

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE terhadap target jangka menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam layanan Publik yang terintegrasi	Indeks SPBE	3,8	3,77	99,2 %
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola	4,27	3,00	70,25 %
		Nilai Layanan	4,3	4,2	97,67 %

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja (Indeks SPBE) pada tingkat Provinsi Jawa Timur lebih rendah (4,45) sedangkan kalo dibandingkan tingkat Nasional maka capaian ini lebih tinggi (3,12). Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Untuk Indikator Tata Kelola SPBE Rata Rata Propinsi (3,07) Kabupaten Blitar lebih rendah, lebih tinggi dari nilai Nasional (2,62). Sedangkan Layanan SPBE untuk rata rata propinsi (3,98) kabupaten Blitar lebih tinggi dan Nasional 3,78 Kabupaten Blitar lebih tinggi. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.11

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/ Nasional Tahun 2024
1	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam layanan Publik yang terintegrasi	Indeks SPBE	3,77	4,45 / 3,12
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola Nilai Layanan SPBE	3.00 4,2	3,07 / 2,62 3,98 / 3,78

Indikator Indeks SPBE adalah hasil evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah dengan 47 indikator. Pemenuhan indikator dicukupi oleh beberapa OPD yang menjadi pelaksana dari SPBE. Dinas kominfo, Statistik dan Persandian selain mengampu beberapa indikator juga mengkoordinator pelaksanaan evaluasi SPBE. Hasil penilaian

tersebut sangat tergantung dari OPD dapat mencukupi data dukung pada saat evaluasi. Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Memenuhi penerapan aspek kebijakan internal tata kelola SPBE yang meliputi seluruh indikator arsitektur, SPBE, Peta rencana SPBE, management data, pembangunan aplikasi SPBE,
2. Layanan pusat data, layanan jaringan infra pemerintah, penggunaan Sistem penghubung layanan (SPLP) dapat digunakan seluruh perangkat daerah.
3. Menerapkan manajemen keamanan Informasi sesuai standard dan strategi pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati nomor 71 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
4. Melaksanakan Audit kemanan SPBE (Audit TIK) secara rutin. Audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan dan dilakukan oleh auditor internal. IPPD telah melakukan evaluasi terhadap hasil temuan / rekomendasi audit kemanan SPBE.
5. Meningkatkan koordinasi Tim Koordinasi SPBE Tingkat Kabupaten Blitar,
6. Peningkatan Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan menyediakan helpdesk layanan aplikasi untuk mempermudah penggunaan aplikasi standart nasional. Heldesk ini juga melayani gangguan insfrastruktur jaringan internet dan gangguan siber.
7. Menghitung tingkat keamanan informasi (Indeks KAMI) secara mandiri dengan standart yang ditentukan oleh BSSM dengan hasil : 75 % untuk 5 area penilaian yaitu : Tata Kelola, Pengelolaan Resiko, Kerangka kerja kemanan informasi, pengelolaan aset serta teknologi dan keamanan informasi.
8. Mengintegrasikan aplikasi umum berbagi pakai ataupun aplikasi lokal yang mendukung kolaborasi antar layanan / aplikasi pada bidang perencanaan , penganggaran, keuangan melalui penerapan SIPD, pengadaan barang jasa melslui penerapan SPBE, kepegawaian melalui penerapan SIASN, layanan pengawasan internal pemerintah.

9. Mengintegrasikan aplikasi umum pada bidang pengaduan pelayanan publik melalui penerapan SPAN LAPOR, Media Sosial dan website Pemkab Blitar (Dolan Muter Blitar).
10. Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik sesuai dengan UU nomor 14 Tahun 2008 menjadi kategori Informatif sesuai hasil monev Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Tahun 2024, pada Tahun 2023 dengan kategori menuju informatif.
11. Mengoptimalkan portal data sebagai media pengumpulan dan diseminasi data sebagai dasar perencanaan evaluasi pembangunan daerah ;
12. Melakukan monitoring progres keterisian data pada portal data serta menjadikan keterisian data portal sebagai salah satu indikator penilaian dalam evaluasi statistik sektoral Harmoni Data Tahun 2024
13. Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dan intensif kepada perangkat daerah melalui pemanfaatan media group whatsapp serta melalui surat Sekretaris Daerah agar kepala Perangkat Daerah memiliki awareness terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik yang dimulai dari perencanaan hingga diseminasinya
14. Mengintensifkan pendampingan pembinaan terhadap Perangkat Daerah selaku produsen data baik melalui forum data, desk data dan koordinasi teknis bersama dengan BPS selaku pembina data serta melibatkan Tenaga Ahli Statistik dalam mereview metadata statistik yang telah disampaikan produsen data
15. Melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah terkait kebutuhan statistik serta berkonsultasi dengan BPS selaku instansi pembina JPT statistik untuk diusulkan dalam formasi jabatan di kementerian PANRB
16. Mengevaluasi hasil evaluasi SPBE Tahun 2023, guna melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi.
17. Mengadakan Diklat bagi PIC perangkat daerah yang menguasai indikator indikator dalam evaluasi SPBE
18. Koordinasi dengan Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur untuk peningkatan Indeks SPBE.
19. Pada Tahun 2024 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian juga memfasilitasi sarana dan prasarana operasional khususnya infrastruktur TIK untuk Kantor

Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Polres Kabupaten Blitar dan Polres Kota Blitar.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi karena beberapa hal bukan menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, sehingga menyebabkan realisasi kinerja tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE adalah sebagai berikut :

1. Aspek Strategis perencanaan SPBE, kelemahan terjadi karena belum adanya proses konsultasi kepada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian untuk kegiatan keterpaduan antara anggaran dan anggaran SPBE (Belum ada clearans rencana anggaran untuk belanja TIK, Data, SDM, Aplikasi). Kelemahan lain pada inovasi proses bisnis yang belum memperlihatkan prubahan proses bisnis dari as-is menuju tp-be.
2. Aspek penerapan manajemen SPBE indikator penerapan kompetensi sumberdaya manusia belum dilaksanakan secara lengkap sesuai aturan yang ada.
3. Aspek Layanan pemerintahan berbasis elektronik, layanan pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
4. Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kemanan Informasi dan statistik (pengolahan Data) di setiap OPD sangat berpengaruh pada penerapan SPBE.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE adalah sebesar **Rp.16.558.599.628** dengan realisasi sebesar **Rp.15.968.391.352** Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE.

Tabel 3.12

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya
Tata Kelola dan Layanan SPBE

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	105,6 %	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp4.962.495.972	Rp4.777.985.499	96,28%
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.962.495.972	Rp4.777.985.499	96,28%
			Sub Kegiatan Monitoring dan Aspirasi Publik	Rp738.723.449	Rp658.740.784	89,17%
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp3.302.380.443	Rp3.214.627.794	97,34%
			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp921.392.080	Rp904.616.921	98,18%
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp5.519.343.659	Rp5.399.292.530	97,82%
			Kegiatan Pengelolaan	Rp4.366.619.406	Rp4.357.987.000	99,80%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp4.366.619.406	Rp4.357.987.000	99,80%
			Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.152.724.253	Rp1.041.305.530	90,33%
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Rp195.888.361	Rp162.105.640	82,75%
			Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Rp364.190.800	Rp313.634.410	86,12%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Kegiatan Sub	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp271.686.589	Rp260.907.228	96,03%
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp271.686.589	Rp260.907.228	96,03%
			Realisasi Anggaran	Rp11.499.281.052	Rp11.177.028.361	97,19%
		105,6 %	Tingkat efisiensi			108,7%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 105,68 % sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar

97,19 %.

Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE dengan nilai efisiensi sebesar 108,7 %.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Meningkatkan koordinasi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Mengevaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi penerapan SPBE
3. Penguatan pada indikator indikator yang lemah sesuai dengan standard atau kebijakan yang berlaku.

3. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.13
Realisasi kinerja dan keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	77,56	68,95	88,89	5.059.318.576	4.791.362.991	94,70
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan dengan	Indeks SPBE	3,8	3,77	99,2	11.499.281.052	0,9719762749042513	97,19%

	penerapan SPBE.							
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

AKUNTABILITAS KEUANGAN (Cost Per Outcome)

Dalam melakukan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar didukung melalui anggaran APBD 2024 sebagai berikut :

1.	Belanja Langsung	:	Rp. 16.558.559.628,00
----	------------------	---	-----------------------

Dari APBD 2024 tersebut, hingga bulan Desember tahun 2024 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 15.968.391.352,00 atau sebesar 96,40% Adapun realisasi belanja langsung tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3. 14
TABEL ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	BELANJA DAERAH			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp12.254.112.689	Rp11.794.733.665	96,25 %
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp1.772.273.058	Rp1.617.455.636	91,26 %

4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp102.301.225	Rp102.203.700	99,90%
5	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.23.268.126	Rp.23.170.900	99,58%
6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp79.033.099	Rp79.032.800	99,99%
7	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.322.475.643	Rp3.209.031.255	96,59%
8	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp29.500.000	Rp29.490.000	99,97%
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp5.930.125	Rp5.633.900	95%
10	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp15.000.000	Rp13.085.000	87,23%
11	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp15.000.000	Rp13.085.000	87,23%
12	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp398.331.475	Rp395.257.003	99,23%
13	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.776.660	Rp2.697.000	96,91%
14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp20.451.328	Rp19.470.300	95,20%

15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp134.821.000	Rp134.041.000	99,42%
16	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp36.477.895	Rp35.562.500	97,49%
17	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.750.000	Rp1.562.000	89,26%
18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp200.054.592	Rp201.930.203	99,94%
19	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp146.079.774	Rp133.752.000	91,56%
20	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp146.079.774	Rp133.752.000	91,56%
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp863.736.458	Rp742.298.140	85,94%
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp4.162.500	Rp4.160.000	99,94%
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.310.000	Rp309.392	23,62%
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp856.263.958	Rp737.828.748	85,97%

25	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp211.394.001	Rp195.735.893	92,59
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp147.365.500	Rp133.124.190	90,34%
27	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp64.028.501	Rp62.611.703	97,79%
28	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp4.962.495.972	Rp4.777.985.499	96,28%
29	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.962.495.972	Rp4.777.985.499	96,28%
30	Sub Kegiatan Monitoring dan Aspirasi Publik	Rp738.723.449	Rp658.740.784	89,17%
31	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp3.302.380.443	Rp3.214.627.794	97,34%
32	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp921.392.080	Rp904.616.921	98,18%

33	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp5.519.343.659	Rp5.399.292.530	97,82%
34	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.366.619.406	Rp4.357.987.000	99,80%
35	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp4.366.619.406	Rp4.357.987.000	99,80%
36	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.152.724.253	Rp1.041.305.530	90,33%
37	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Rp195.888.361	Rp162.105.640	82,75%
38	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp364.190.800	Rp313.634.410	86,12%
39	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp381.051.099	Rp372.894.72	97,86%
40	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp95.351.902	Rp80.719.000	84,65%

41	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp116.242.091	Rp111.951.608	96,31%
42	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp745.754.832	Rp738.843.104	99,07%
43	Urusan Statistik	Rp745.754.832	Rp738.843.104	99,07%
44	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp745.754.832	Rp738.843.104	99,07%
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp561.029.012	Rp555.583.074	99,03%
46	Membangun Metadata Statistik Sektora	Rp184.725.820	Rp183.260.030	99,21%
47	Urusan Persandian	Rp271.686.589	Rp260.907.228	96,03%
48	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp271.686.589	Rp260.907.228	96,03%
49	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp271.686.589	Rp260.907.228	96,03%

50	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp271.686.589	Rp260.907.228	96,03%
----	--	---------------	---------------	--------

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp **15.968.391.352,00** atau sebesar 96,40%. dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp **16.558.559.628,00**

4. Prestasi/ Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mendapatkan prestasi/ penghargaan berupa :

1. Predikat Informatif untuk implementasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 hasil Monev Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Tahun 2024
2. Indeks SPBE : 3,77 (sangat Baik) hasil Evaluasi Penerapan SPBE oleh Kemenpan RB Tahun 2024 (meningkat dari Tahun 2023 : 3,63)
3. Indeks Smart city Tahun 2024 : 3,19 hasil evaluasi dari Kementrian Kominfo Tahun 2024 meningkat dari Tahun 2023
4. Penghargaan Anindita Wistara Data hasil evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) dengan kategori Baik (2,9) meningkat 0,18 dari Tahun 2023.
5. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dari Bapenas Tahun 2024 dengan nilai 77,12 kategori Baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai alat evaluasi untuk bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. LKjIP juga disusun sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Kabupaten Blitar dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 maupun Renja 2024 dikategorikan berhasil karena memperoleh capaian rata-rata 100,1 % (*Seratus koma satu persen*).

Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran pada Tujuan

1. "Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi " dengan perincian sebagai berikut:

Indikator Sasaran : Nilai Indeks SPBE

Indikator Sasaran : Nilai Tata Kelola SPBE

Indikator Sasaran 3 : Nilai Layanan SPBE

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran : Nilai SAKIP.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran antara lain :

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Meningkatnya Tata Kelola dan layanan SPBE	- Mensosialisasikan arsitektur proses bisnis dan layanan sistem elektronik sesuai indikator yang ada di SPBE. - Menyusun standar manajemen layanan mulai dari pelayanan pengguna hingga pengoperasian	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Gov dalam penyelenggaraan Pemda Kab/Kota	√		

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		layanan tersebut. Sosialisasi standar teknis pengembangan aplikasi				
2	Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	- Optimalisasi dukungan perangkat daerah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. - Mengadakan rapat koordinasi dan monev atas hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi. - Himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan	- Program Informasi Komunikasi Publik - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	√		

		an anggaran keterbukaan informasi publik				
--	--	---	--	--	--	--

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
3	Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Daerah	• Pendampingan Pengolahan Data Statistik Sektoral pada Perencanaan pembangunan dan Evaluasi pembangunan pada perangkat daerah. • Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi.	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	√	√	√

4	Meningkatnya Keamanan Informasi.	• Pendampingan dan Asistensi Indeks KAMI dan Manajemen Risiko SPBE perangkat daerah yang menjadi objek penilaian yang memperoleh nilai rendah. • Memberikan rekomendasi pada perangkat daerah yang menjadi sasaran	- Program Penyelenggaraan Persandian U untuk Pengamanan Informasi - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	√	√	√
---	----------------------------------	---	---	---	---	---

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		penilaian Indeks KAMI	Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja - Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian kebijakan, strategi, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja - Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√		

		Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektivitas dan				
--	--	---	--	--	--	--

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan				

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2024 , semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Semoga dokumen LKjiP ini dapat berguna bagi sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN
I

MATRIK RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK dan Persandian
KABUPATEN BLITAR 2021-2026

VISI :

MISI :

URAIAN	TUJUAN					SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN		K E T
	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN II

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BLITAR

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				KEGIATAN			
UR AIA N	IND IKA TO R	T A R G E T	URAI AN	INDI KAT OR PR O GR AM	T A R G E T	A N G G A R A N	URA IAN	IND IKA TO R KE GI A TA N	T A R G E T	A N G G A R A N	URAIA N	INDIKAT OR SUBKE GIATAN	TAR GET	A N G G A R A N

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR 2023

Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formulasi perhitungan	Kinerja			Program			Anggaran	
			Target	Realisasi	% Capaian				Alokasi	Realisasi
										% Capaian

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PERANGKAT DAERAH
ESELON II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN WIDODO, SH.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Rini Syarifah

Jabatan : Bupati Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Blitar, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian

A blue ink handwritten signature, which appears to be "H", is written below the official title.

† **HERMAN WIDODO, SH.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Tata Kelola SPBE	2,5	Indeks
		Nilai Layanan SPBE	4,0	Indeks

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.848.152.184	APBD
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.181.071.000	APBD/DBHCHT
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 4.955.500.450	APBD
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 673.049.600	APBD
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 380.490.000	APBD
Jumlah	Rp. 13.038.263.634	APBD

Blitar, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Bupati Blitar



RINI SYARIFAH

HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT
DAERAH ESELON III



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURLINA S.Sos., MM.

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERMAN WIDODO, SH

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian


HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001


MURLINA, S.Sos., MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690910 199202 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
MURLINA S.Sos., MM.

No.	Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	96%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp. 102.301.225	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.322.475.643	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 398.331.475	APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Rp. 146.079.774	APBD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 863.736.458	APBD
7. Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 211.394.001	APBD

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

MURLINA, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690910 199202 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT
DAERAH ESELON IV



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI WIDYANTI SETYAWATI, S. Hut.

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MURLINA, S.Sos., MM.

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Oktober 2024

Sekretaris Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian

Kasubbag Umum dan Kepegawaian


MURLINA, S.Sos., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690910 199202 2 003


TRI WIDYANTI SETYAWATI, S. Hut.

Penata

NIP. 19810602 201502 2 001

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
TRI WIDYANTI SETYAWATI, S. Hut

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Listrik	Jumlah Paket Komponen instalasi yang disediakan	4 Paket
2	Terselenggaranya Penyediaan alat dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	3 Paket
3	Terselenggaranya Penyediaan Bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	2 Paket
4	Terselenggaranya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	8 Paket
5	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	1 Dokumen
6	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi SKPD yang terlaksana	1 Laporan
7	Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah unit sarana dan prasarana yang dilakukan pengadaan	14 Unit
8	Terselenggaranya penyediaan surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
9	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1 Laporan
10	Terselenggaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa umum pelayanan kantor	1 Laporan
11	Terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	15 Unit

12	Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit
----	--	---	--------

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.776.660	APBD
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 20.451.328	APBD
3. Penyediaan Bahan Logistik	Rp. 134.821.000	APBD
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 36.477.895	APBD
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.750.000	APBD
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 202.054.592	APBD
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 146.079.774	APBD
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.162.500	APBD
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.310.000	APBD
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 858.263.958	APBD
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 147.365.500	APBD

12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Rp. 64.028.501 APBD
Lainnya

Blitar, 31 Oktober 2024

Sekretaris Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



MURLINA, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690910 199202 2 003



TRI WIDYANTI SETYAWATI, S. Hut.
Penata
NIP. 19810602 201502 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT
DAERAH ESELON IV



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. TALININGTYAS SETYO S., SE.

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MURLINA, S.Sos.,MM.,

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

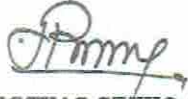
Blitar, 31 Oktober 2024

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian


MURLINA, S.Sos.,MM.

Pembina Tk.I
NIP. 19690910 199202 2 003


F. TALININGTYAS SETYO S., SE.

Penata Tingkat I
NIP. 19860517 200901 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
F. TALININGTYAS SETYO S., SE.

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	4 dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	2 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp. 102.301.225	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.322.475.643	APBD
Jumlah	Rp 3.424.776.868	

Blitar, 31 Oktober 2024

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian


MURLINA S. Sos., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690910 199202 2 003


F. TALININGTYAS SETYO S., SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19860517 200901 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT
DAERAH PELAKSANA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHANI SRIWAHYUNI JASIN

Jabatan : Bendahara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : F. TALININGTYAS SETYO, SE

Jabatan : Kasubbag Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Oktober 2024

Kasubbag Keuangan

Bendahara

F. TALININGTYAS SETYO, SE.

Penata Tingkat I

NIP. 19860517 200901 2 005

ADHANI SRIWAHYUNI JASIN.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19690228 199003 2 006

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
ADHANI SRIWAHYUNI JASIN

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%
2			
3			

Kasubbag Keuangan



F. TALININGTYAS SETYO, SE.

Penata Tingkat I

NIP. 19860517 200901 2 005

Blitar, 31 Oktober 2024

Bendahara



ADHANI SRIWAHYUNI JASIN.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19690228 199003 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT
DAERAH ESELON III



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIES SYAMSUDDIN, S.Kom., MT.

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERMAN WIDODO, SH

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

ARIES SYAMSUDDIN, S.Kom., MT
Penata Tingkat I
NIP. 19830407 200901 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
ARIES SYAMSUDDIN, S.Kom., MT.

No.	Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp. 1.152.724.253	APBD

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

ARIES SYAMSUDDIN, S.Kom., MT
Penata Tingkat I
NIP. 19830407 200901 1 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT
DAERAH ESELON III



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASYIK FAUZI, ST, MT.

Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERMAN WIDODO, SH

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik

HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

ASYIK FAUZI, ST., MT.
Pejabat Tingkat I
NIP. 19781031 200901 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
ASYIK FAUZI, ST, MT.

No.	Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses Informasi (Hasil Survey IKM)	85,02%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp. 738.723.449	APBD
2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 3.302.380.443	APBD/DBHCHT
3. Pelayanan Informasi Publik	Rp. 921.392.080	APBD

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik


HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001


ASYIK FAUZI, ST., MT.
Penata Tingkat I
NIP. 19781031 200901 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT
DAERAH ESELON III



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELI RATNAWATI ANA YOHANA, SSI

Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERMAN WIDODO, SH

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Persandian dan
Keamanan Informasi

HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

HELI RATNAWATI ANA YOHANA, SSI
Pembina
NIP. 19810116 200501 2 016

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
HELI RATNAWATI ANA YOHANA, SSI

No.	Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani Infrastruktur TIK	100%
2	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi	90%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp. 4.366.619.406	APBD
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 271.686.589	APBD

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Bidang Persandian dan
Keamanan Informasi

HELI RATNAWATI ANA YOHANA, SSI
Pembina
NIP. 19810116 200501 2 016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BLITAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULFATUL UMAMI, S.ST., MT., M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sektoral, Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERMAN WIDODO, SH.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian,

HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

Kepala Bidang Statistik,

ULFATUL UMAMI, S.ST., MT., M.Sc

Pembina
NIP. 19851112 200801 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan statistik sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 persen

Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 745.754.832,-
Jumlah	Rp 745.754.832,-

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian,



HERMAN WIDODO. SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199112 1 001

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Bidang Statistik,



ULFATUL UMAMI, S.ST., MT., M.Sc

Pembina

NIP. 19851112 200801 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PELAKSANA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH RETNA WULANDARI, S.Si
Jabatan : Analis Data dan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ULFATUL UMAMI, SST, MT, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Statistik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Statistik

ULFATUL UMAMI, SST, MT, M.Sc

Pembina

NIP. 19851112 200801 2 001

Blitar, 31 Oktober 2024
Analis Data dan Informasi

DYAH RETNA WULANDARI, S.Si

Penata

NIP. 19910715 201503 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
ANALIS DATA DAN INFORMASI

No.	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terbangunnya metadata statistik sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen

Kepala Bidang Statistik



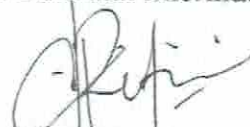
ULFATUL UMAMI, SST, MT, M.Sc

Pembina

NIP. 19851112 200801 2 001

Blitar, 31 Oktober 2024

Analisis Data dan Informasi



DYAH RETNA WULANDARI, S.Si

Penata

NIP. 19910715 201503 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PELAKSANA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CORINA MALTA OLIVIA, S.Si
Jabatan : Analis Statistik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ULFATUL UMAMI, SST, MT, M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Statistik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 31 Oktober 2024

Kepala Bidang Statistik

Analis Statistik

ULFATUL UMAMI, SST, MT, M.Sc

CORINA MALTA OLIVIA, S.Si

Pembina

Penata Muda

NIP. 19851112 200801 2 001

NIP. 19910415 202203 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
ANALIS STATISTIK

No.	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	5 Dokumen

Kepala Bidang Statistik



ULFATUL UMAMI, SST, MT, M.Sc

Pembina

NIP. 19851112 200801 2 001

Blitar, 31 Oktober 2024

Analisis Statistik



CORINA MALTA OLIVIA, S.Si

Penata Muda

NIP. 19910415 202203 2 003



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. BLITAR



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

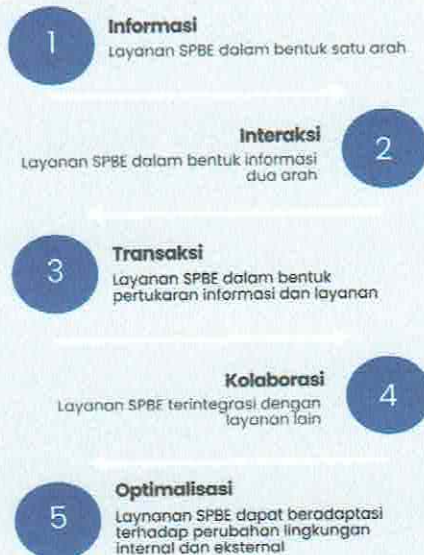
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



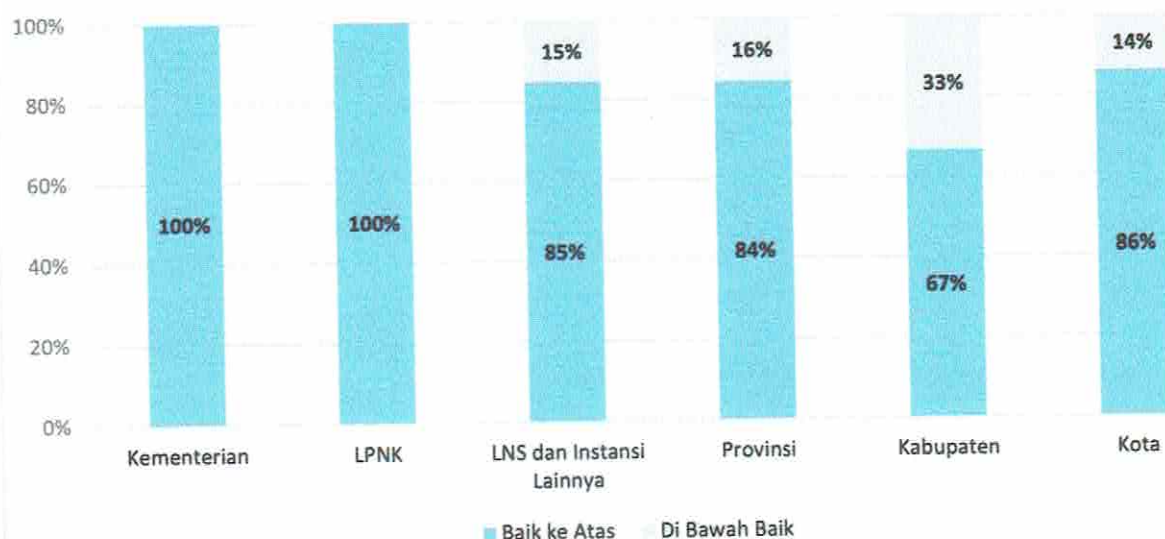
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

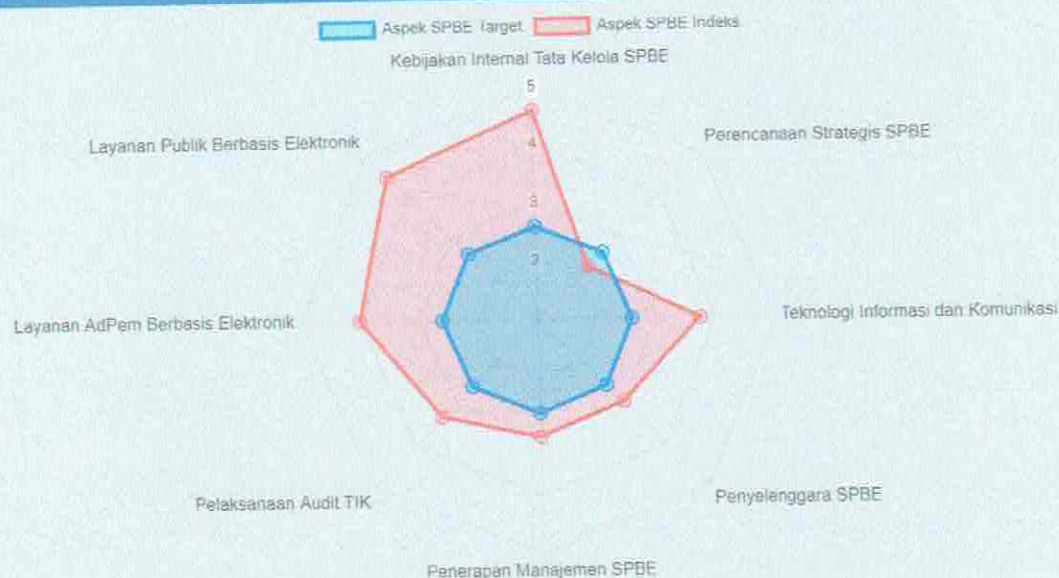
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,77
Domain Kebijakan SPBE	4,60
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,60
Domain Tata Kelola SPBE	3,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	3,09
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,00
<i>Audit TIK</i>	3,33
Domain Layanan SPBE	4,20
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,00
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,50

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Blitar meliputi seluruh indikator meliputi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini terlihat bahwa hampir semua indikator menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Blitar, meliputi Arsitektur SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE. Ini dicapai dengan adanya kebijakan baru hasil dari review kebijakan lama.

- Kelemahan

Pemkab Blitar tidak memiliki kelemahan untuk Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Blitar meliputi hampir seluruh indikator yaitu Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Blitar.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemkab Blitar masih memiliki kelemahan dalam Aspek Perencanaan Strategis SPBE. pada indikator Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE yang tidak dilengkapi dengan data dukung tentang konsultasi ke Dinas Kominfo ataupun adanya SOP yang mengatur hal tersebut serta indikator Inovasi Proses Bisnis SPBE tidak menunjukkan adanya perubahan dari proses bisnis as-is dan proses bisnis to-be).

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Blitar meliputi keseluruhan indikator yaitu Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini, terlihat ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Blitar yaitu Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra. Kedua layanan telah dipergunakan di semua unit kerja, menggunakan PDN, memiliki SOP pengelolaan dan telah direview. Untuk layanan jaringan perbaikan telah dilakukan sesuai dengan hasil review.

- Kelemahan

Pemkab Blitar tidak memiliki kelemahan untuk Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Blitar meliputi seluruh indikator yaitu Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini, belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Blitar.

- Kelemahan

Pemkab Blitar tidak memiliki kelemahan untuk Aspek Penyelenggara SPBE.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Blitar meliputi seluruh indikator yaitu Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini, beberapa indikator yang telah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Blitar meliputi Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang sudah dilaksanakan sesuai standard dan strategi pelaksanaannya sudah diatur dalam PerBup No 71 tentang SMKI.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Pemkab Blitar masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan Penerapan Manajemen SPBE, yaitu Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi standard yang diberikan.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Blitar meliputi semua indikator yaitu Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini, terlihat bahwa ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Blitar yaitu Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang sudah dilaksanakan secara rutin, dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK Eksternal Tersertifikasi dan IPPD telah melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit Keamanan SPBE.
- **Kelemahan**
Pemkab Blitar tidak memiliki kelemahan untuk Aspek Pelaksanaan Audit TIK.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Blitar meliputi hampir semua indikator yaitu Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terlihat bahwa hampir semua indikator menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Blitar. Pemanfaatan meliputi Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai. Hal ini dicapai dengan dengan penyediaan berbagai aplikasi standard nasional dengan kapabilitas kolaborasi serta adanya kegiatan optimalisasi layanan dengan menyediakan help desk untuk mempermudah penggunaannya.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Pemkab Blitar masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu Penerapan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah yang belum memenuhi standard yang diberikan karena tidak terdapat data dukung yang sesuai dengan kegiatan transaksional ataupun kolaborasi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Blitar meliputi seluruh indikator, yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat bahwa hampir semua indikator menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Blitar. Pemanfaatan meliputi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1 (SIKS-NG), dan Layanan Publik Sektor 2 (OSS-eReklame). Ini dicapai dengan penyediaan berbagai aplikasi standard nasional maupun aplikasi lokal dengan kapabilitas kolaborasi bahkan beberapa sudah dioptimalkan dengan penyediaan Help Desk dan kebijakan turunan.
- **Kelemahan**
Pemkab Blitar tidak memiliki kelemahan untuk Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemkab Blitar. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Blitar sudah dapat menggambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemkab Blitar adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Keunggulan ini terlihat dari penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang menggunakan dokumen kebijakan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2022 tentang SPBE yang lengkap dan merupakan perbaikan dari peraturan bupati sebelumnya. Dokumen tersebut sudah mengatur Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, dan Audit TIK. Surat Edaran terkait dengan kebijakan tersebut juga sudah diterbitkan yang menggambarkan implementasi review terhadap kebijakan internal tersebut. Sementara Tim Koordinasi SPBE juga diatur dengan kebijakan PerBup yang sama dan sudah dilengkapi dengan SK Tim Koordinasi SPBE. Pada penerapan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini keunggulan terlihat ada Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra yang sudah sesuai dengan standard dan dipergunakan di seluruh unit serta sudah direview.

Keunggulan ini juga terlihat dari penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melakukan pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai ataupun aplikasi lokal yang mendukung kolaborasi antar layanan/ aplikasi pada bidang perencanaan, penganggaran, keuangan melalui penerapan SIPD, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SPSE, kepegawaian melalui penerapan SIASN, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dengan mengimplementasikan Aplikasi Jaga.id, Layanan akuntabilitas kinerja organisasi melalui penerapan aplikasi Si Yakin, dan Layanan Kinerja Pegawai dengan penerapan aplikasi Sikandasehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik.

Selain itu, pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang pengaduan pelayanan publik melalui penerapan SP4N LAPOR, Layanan Data Terbuka melalui penerapan Satu Data Blitar, hukum melalui penerapan JDIH, Layanan Publik Sektor 1 dengan penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) untuk Pengentasan Kemiskinan, dan Layanan Publik Sektor 2 dengan penerapan aplikasi OSS dan e-Reklame. sehingga layanan publik dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemkab Blitar menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal).

Namun di sisi lain, Pemkab Blitar masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, kelemahan terjadi karena belum adanya proses konsultasi kepada Dinas Kominfo untuk kegiatan keterpaduan antara anggaran dan anggaran SPBE. Kelemahan lain pada Inovasi Proses Bisnis SPBE yang belum memperlihatkan perubahan proses bisnis dari as-is menuju to-be. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE indikator Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia belum dilaksanakan secara lengkap sesuai dengan aturan yang ada. Di sisi lain, pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah belum dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Saran perbaikan yang perlu dilakukan adalah pada indikator-indikator yang masih lemah, semua harus diperbaiki paling tidak agar sesuai dengan standard atau kebijakan yang berlaku. Di sisi lain untuk aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah baik maka kedua aspek tersebut bisa ditingkatkan dengan melaksanakan proses optimalisasi dengan menyediakan layanan kegiatan help desk dan kebijakan turunan untuk mendukung pemanfaatan layanan yang lebih baik. Dan untuk indikator yang belum baik perlu diperbaiki dengan memasang layanan berbasis aplikasi nasional standard atau aplikasi lokal yang sudah bisa berkolaborasi dengan layanan/ aplikasi lain.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3

SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia

Istana Negara, Jakarta
27 Mei 2024

Logo of the Ministry of State Apparatus Utilization, Government Reform and Bureaucratic Reform (PANRB) and other participating organizations.



panrb

KEMENTERIAH
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Seorang untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024